

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia

Adi Putra

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

Email: adiputra@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK- Dalam struktur pemerintahan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. MK memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara tidak tumpang tindih atau disalahgunakan. Tugas utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran MK dalam mengawasi kekuasaan negara, guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan publik dan merusak tatanan hukum negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berperan penting dalam memastikan sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan adil dan seimbang, dengan cara mengawasi serta memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan memberikan interpretasi terhadap aturan konstitusi yang dapat memengaruhi distribusi kekuasaan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa MK tidak hanya berfungsi menjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penghubung antara lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Keseimbangan Kekuasaan, Sistem Pemerintahan

ABSTRACT - In the structure of Indonesia's government, the Constitutional Court (MK) holds a strategic role in maintaining the balance of power. The MK ensures that the powers granted to state institutions do not overlap or get abused. The primary duties of the MK include reviewing laws against the 1945 Constitution and resolving disputes over authority between state institutions. This study aims to examine the role of the MK in supervising state power to prevent abuses that could harm public interests and undermine the legal order of the state. The research employs a normative juridical approach with descriptive analysis, utilizing data sources such as legislation, Constitutional Court rulings, and related literature. The findings reveal that the MK plays a critical role in ensuring that Indonesia's government system operates fairly and equitably by overseeing and resolving authority disputes among state institutions and providing interpretations of constitutional rules that can influence the distribution of power. This study also concludes that the MK not only functions to safeguard the constitution but also serves as a bridge between state institutions, each with their respective authorities.

Keywords: Constitutional Court, Balance of Power, Government System

PENDAHULUAN

Reformasi yang menghasilkan empat kali perubahan terhadap UUD 1945 telah memberikan nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang diadopsi merupakan hal yang relatif baru bagi Indonesia, karena mengedepankan pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional, menggantikan model sebelumnya yang bersifat vertikal hirarkis dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kekuasaan. Pergeseran ini mengubah kedudukan lembaga negara menjadi setara, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperbaiki aturan dasar yang diperlukan dalam mengelola negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembentukan kekuasaan yang tegas, sistem *checks and balances* yang transparan, serta pembentukan lembaga negara yang baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Didirikan pada tahun 2003, MK bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi. MK berperan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Lebih dari itu, MK juga bertugas untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dengan cara yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas negara. Putusan-putusan MK sering menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, seperti yang terlihat dalam beberapa keputusan yang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, terutama yang mengancam hak konstitusional warga negara. Keputusan-keputusan tersebut juga menggambarkan kemampuan MK untuk menghadapi tekanan politik, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Dalam beberapa kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK juga berhasil mencegah terjadinya krisis politik yang dapat merusak stabilitas pemerintahan.

Pengaruh dari perkembangan pemikiran hukum dan sistem ketatanegaraan modern pada abad ke-20 mendorong gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pengalaman krisis konstitusional sebelumnya dan transisi dari sistem pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis sering kali menjadi faktor pendorong

untuk membentuk MK. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan hukum dan keseimbangan kekuasaan, serta menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Dalam penelitiannya, Andi Omara (2017) berjudul "*Interpreting The Indonesian Constitutional Court Approach In Conducting Judicial Review On Cases Related To Economic And Social Rights*", mengungkapkan bahwa salah satu fungsi MK adalah menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Apabila MK memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa MK menerapkan *judicial review* yang ketat sesuai dengan ketentuan konstitusional, meskipun dalam beberapa kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial, MK cenderung menerapkan *judicial review* yang lebih hati-hati. Artikel tersebut bertujuan menjelaskan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* yang kuat, dalam praktiknya, MK sering kali menggunakan *judicial review* yang lebih terbatas.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam sistem kehakiman, Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap negara membentuk Mahkamah Konstitusi, tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga legislatif dan keputusan mereka dapat menjadi undang-undang. Sebagai lembaga independen, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada hukum sipil, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan independen, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kekuatan eksternal.

Prinsip keseimbangan kekuasaan menegaskan bahwa tidak ada lembaga negara yang dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa pengawasan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir telah membantu menjaga stabilitas politik dan hukum serta memperkuat demokrasi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memperlihatkan supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta hak-hak masyarakat. Dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum

yang semakin kompleks, peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi integritas konstitusi semakin vital.

Menjaga prinsip *checks and balances* sangat sulit namun krusial bagi stabilitas sistem pemerintahan Indonesia. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang dengan kewenangan untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya, peran MK dalam menguji undang-undang yang disahkan oleh DPR memastikan produk legislasi tetap berada dalam koridor konstitusional dan mencegah dominasi kekuasaan oleh salah satu pihak. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan akhir yang mengikat dalam konflik antara DPR dan Presiden mengenai interpretasi atau pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara MK dan lembaga negara lainnya sangat penting dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kemandirian dan keberanian Mahkamah Konstitusi sering diuji oleh tekanan politik dan pengaruh eksternal, namun keberhasilannya dalam mempertahankan prinsip pengaturan dan keseimbangan kekuasaan sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum dan keseimbangan kekuasaan sangat relevan untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan adanya keseimbangan kekuasaan di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu. Selanjutnya, data yang terkumpul akan diproses melalui pengolahan dan pengutipan referensi yang ada, yang akhirnya dipresentasikan sebagai hasil penelitian. Informasi yang diperoleh akan dirangkum dan diinterpretasikan untuk memberikan kesimpulan yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

KAJIAN TEORI

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memiliki kewenangan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan tindakan pemerintah dengan konstitusi. Teori mengenai *judicial review* menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi, bertindak sebagai pengadil aktif yang membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip dasar negara. Penelitian oleh Jimly Asshiddiqie dan Zenal Setiawan mengungkapkan pentingnya independensi MK dalam menghadapi tekanan politik dan fungsi MK dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional masyarakat.

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Studi oleh Suci Wulandari menegaskan pentingnya MK dalam sistem *checks and balances*, meskipun tantangan dalam harmonisasi dengan lembaga yudikatif lain, seperti Mahkamah Agung, tetap ada. Penelitian ini mendukung pemahaman bahwa MK adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas hukum dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia.

Implementasi keputusan MK sering kali menghadapi tantangan signifikan, terutama dari resistensi politik dan kepentingan eksternal. Teori tekanan politik menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan besar, pelaksanaan keputusan sering terhambat oleh pengaruh politik dan birokrasi, yang menyebabkan beberapa keputusan MK sulit untuk diterapkan secara efektif. Penelitian oleh Fajar Laksono dan Selamat Sentosa Hasibuan memberikan wawasan mengenai kesulitan yang dihadapi MK dalam implementasi keputusan dan intervensi dalam kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang dan kebijakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan kewenangan ini, MK memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan konstitusi, sehingga tercipta tatanan hukum yang adil dan berkeadilan.

MK juga bertugas menyelesaikan berbagai sengketa yang berpotensi menggoyahkan keseimbangan kekuasaan, seperti perselisihan kewenangan antar-lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam menjalankan peran tersebut, MK menjadi garda terdepan dalam menegakkan prinsip *checks and balances*, yakni memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang memiliki dominasi atau menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, fungsi MK dalam menjaga keseimbangan hubungan antar-lembaga negara diharapkan tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pasal 24C UUD 1945 yang secara tegas mengatur kewenangan lembaga ini. Pasal 24C ayat (1) menyebutkan bahwa MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara yang diatur oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 24C ayat (2) menambahkan bahwa MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut konstitusi.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada UUD 1945 dan berlandaskan ideologi Pancasila, keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai mekanisme pengoreksi untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara bekerja sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. Melalui fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan menjamin bahwa kinerja antar-lembaga negara dapat saling mengoreksi secara konstruktif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar penting dalam mendukung tata kelola negara yang berlandaskan hukum dan keadilan.

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peran utama lembaga ini adalah memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah sejalan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan fungsinya, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup empat hal yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau ketidakmampuan memenuhi syarat sebagai pemimpin negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan DPR jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Sebagai lembaga yang berfungsi melakukan *judicial review*, MK memiliki otoritas untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam teori peninjauan konstitusi, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi acuan bagi setiap produk legislasi. Hal ini menjadikan MK sebagai penegak utama prinsip-prinsip dasar negara, termasuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dari ancaman pelanggaran.

Keputusan MK sering kali mencerminkan upaya untuk menjaga supremasi konstitusi dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Dalam berbagai kasus, MK telah membatalkan ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi atau melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tindakan ini mencerminkan prinsip aktivisme hukum, di mana MK bertindak tidak hanya sebagai pengadil pasif yang menunggu kasus diajukan, tetapi juga sebagai pelindung aktif konstitusi dalam menghadapi kebijakan yang berpotensi menyimpang.

Penelitian oleh Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa *judicial review* di Indonesia sering menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi tekanan politik. Ia menekankan bahwa independensi Mahkamah Konstitusi harus senantiasa dijaga agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari kepentingan eksternal. Sementara itu, penelitian lain oleh Zenal Setiawan mengungkapkan bahwa peran MK tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Temuan ini

semakin menegaskan pentingnya MK dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas hukum di Indonesia.

Sebagai pilar penting dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi. Melalui perannya yang strategis, MK berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan kewenangan serta memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki dominasi kekuasaan yang berlebihan, sehingga prinsip demokrasi dan kebebasan rakyat tetap terjaga. Dalam sistem pemerintahan demokratis, prinsip pengawasan dan keseimbangan sangat krusial untuk menghindari monopoli kekuasaan yang dapat mengancam stabilitas politik dan konstitusi negara.

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi. Jika suatu lembaga melampaui kewenangannya atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Mahkamah Konstitusi akan menyelidiki dan memberikan putusan yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi kerap menjadi penengah dalam perselisihan kewenangan antara eksekutif dan legislatif, seperti dalam situasi di mana terdapat perbedaan pandangan antara Presiden dan DPR mengenai pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan. Dalam kasus semacam itu, Mahkamah Konstitusi menentukan siapa yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi, sehingga hubungan antar-lembaga tetap berjalan secara adil dan seimbang.

Selain menyelesaikan sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi juga bertugas memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh DPR maupun Presiden tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan ketentuan yang melanggar konstitusi, sehingga supremasi konstitusi tetap terjaga.

Studi yang dilakukan oleh Suci Wulandari dan timnya mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran esensial dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia. Lembaga ini memungkinkan setiap lembaga negara bekerja secara independen

namun tetap saling mengawasi, sesuai dengan prinsip checks and balances. Wulandari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menjaga harmoni sistem ketatanegaraan dengan memeriksa undang-undang serta menyelesaikan sengketa antar-lembaga negara. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan peran Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hubungannya dengan lembaga yudikatif lainnya, seperti Mahkamah Agung. Muhammad Abdul Aziz Nurambiya mencatat bahwa ketidakharmonisan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sering kali menimbulkan disharmoni yang membutuhkan perbaikan melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga. Meskipun demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan tetap menjadi elemen vital dalam sistem pemerintahan Indonesia.

3. Tantangan dalam Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang luas untuk melindungi konstitusi dan menjaga keseimbangan kekuasaan, namun tantangan terbesar muncul pada tahap pelaksanaan keputusan. Implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi resistensi, terutama dari pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung, seperti lembaga legislatif atau eksekutif, yang kadang mencoba mengabaikan atau bahkan menentang putusan tersebut. Tantangan ini semakin rumit ketika ada kekuatan politik atau kepentingan eksternal yang berusaha memengaruhi kebijakan maupun keputusan Mahkamah Konstitusi.

Fajar Laksono, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi selalu berusaha independen dalam membuat putusan setelah mendengarkan berbagai pihak. Namun, tantangan nyata muncul saat keputusan tersebut harus diimplementasikan. Ia menyatakan bahwa begitu keputusan masuk ke dalam tahap implementasi, Mahkamah Konstitusi tidak lagi bekerja sendirian. Pada tahap ini, banyak kepentingan yang mulai masuk, seperti revisi oleh pembentuk undang-undang, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya berada dalam kendali lembaga tersebut, melainkan bergantung pada koordinasi dan dukungan dari lembaga-lembaga negara lainnya.

Teori tekanan politik menunjukkan bahwa lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh eksternal. Kondisi ini menjelaskan mengapa beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi resistensi

politik. Bahkan dalam kasus di mana Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan yang jelas, pihak-pihak tertentu tetap berusaha mempersoalkan atau menunda implementasinya. Masalah ini semakin terasa dalam pelaksanaan putusan yang mengubah kebijakan atau undang-undang yang telah diberlakukan sebelumnya, di mana proses eksekusi keputusan sering kali terganjal oleh birokrasi atau kepentingan politik.

Keterbatasan lain yang sering dihadapi Mahkamah Konstitusi adalah soal intervensi dalam kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Selamat Sentosa Hasibuan (2024) mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama adalah perdebatan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat campur tangan dalam kebijakan publik. Hasibuan menekankan adanya ruang abu-abu dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan yang tidak secara langsung berkaitan dengan konstitusi. Dalam kasus semacam ini, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema untuk menentukan batas intervensinya, yang sering kali memunculkan perdebatan tambahan.

Situasi ini menggambarkan kompleksitas pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun lembaga ini berwenang untuk membatalkan atau merevisi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, efektivitas pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada kemauan dan koordinasi lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini menjadi pengingat bahwa kekuatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada wewenang yang dimilikinya, tetapi juga pada ekosistem politik dan hukum yang mendukung pelaksanaan keputusannya.

SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilu. Fungsi ini penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan lembaga negara lainnya tetap selaras dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat.

Dalam melaksanakan putusannya, MK menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi resistensi politik atau kekuatan eksternal yang berusaha memengaruhi kebijakan dan keputusan MK. Meskipun MK berusaha independen dalam membuat putusan, proses implementasi sering kali terhambat oleh kepentingan politik, birokrasi, atau

perdebatan tentang batasan intervensi MK dalam kebijakan publik. Meskipun demikian, MK tetap menjadi pilar penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances*, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Augustine Budianto, V. (2022). Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?. Available online from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menyelesaikan-lt5e60b8476a3da/?> [Accessed Sept 10, 2024].
- Gaffar, J. M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- Hasibuan, S. S. (2018). *Hukum Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 250-252.
- Hasibuan, S. S., et al. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 5: 2531-2539.
- Hidayat, A. (2016). *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Mertokusumo, S. (2018). *Penegakan Hukum dan Kekuasaan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Available online from: <https://testing.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan> [Accessed Sept 12, 2024].
- Omara, A. (2017). Interpreting The Indonesian Constitutional Court Approach In Conducting Judicial Review On Cases Related To Economic And Social Rights. *Indonesia Law Review*, Vol. 7 No. 2: 139-154, Article 1.
- Sari, E. (2006). Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-Undang. *Demokrasi*, Vol. V No. 1: 13-22.
- Setiawan, Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No. 2: 19-25, Mei 2024.

- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3: 356-374.
- SINDOMedia. (2024). Tugas, Fungsi, Peran dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi. Available online from: <https://nasional.sindonews.com/read/1440779/13/tugas-fungsi-peran-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi-1724310509> [Accessed August 16, 2024].
- Wiyono, B. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Wulandari, S., et al. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No. 2: 200-222, November 2023.
- Zenal Setiawan, Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No. 2: 19-25, Mei 2024.

